

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum atau berjalan kaki, merupakan respon terhadap keterbatasan fasilitas umum yang tersedia, seperti pedestrian yang tidak memadai, trotoar yang sempit, atau bahkan tidak tersedia di banyak wilayah, serta moda transportasi umum yang seringkali kurang terawat dan tidak nyaman (Susilo, Y. O., & Joewono, 2017). Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil, sebagai solusi utama mobilitas sehari-hari (Sutandi, A. C., & Candra, 2015). Selain itu, minimnya integrasi antar moda transportasi umum dan ketidakmerataan layanan di daerah perkotaan maupun pedesaan semakin memperkuat preferensi masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan pribadi (Prasetijo, J., Daniel, B. D., & Masirin, 2018).

Kecenderungan ini tidak hanya berdampak pada tingginya tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tetapi juga menciptakan peluang pasar yang signifikan bagi industri otomotif, termasuk kendaraan listrik (*Electric Vehicle*/EV). Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dianggap sebagai pasar potensial bagi penjualan kendaraan, baik konvensional maupun listrik (International Energy Agency (IEA), 2021). Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong transisi menuju energi bersih dan pengurangan emisi karbon semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai target

pasar utama bagi produsen EV global (Ministry of Economy and Finance, 2020). Kombinasi antara budaya transportasi yang mengandalkan kendaraan pribadi dan fasilitas umum yang kurang memadai menjadikan Indonesia sebagai pasar yang strategis bagi pengembangan dan penjualan kendaraan listrik. Hal ini juga didukung oleh upaya pemerintah dalam menarik investasi asing untuk membangun industri EV domestik, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global (Wu, 2021).

Selain faktor budaya transportasi dan dukungan kebijakan domestik, perkembangan pesat teknologi kendaraan listrik (EV) secara global turut mempengaruhi posisi Indonesia sebagai pasar strategis, terutama dalam menghadapi persaingan dan ekspansi dari negara-negara dominan seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Perkembangan teknologi kendaraan listrik EV telah mengalami akselerasi signifikan dalam satu dekade terakhir, menjadi indikator transformasi global menuju ekonomi rendah karbon. Di kawasan Asia, Tiongkok dan Korea Selatan muncul sebagai pemain dominan dalam industri EV, dengan strategi ekspansi agresif ke pasar-pasar berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Keohane dan Nye, fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan internasional kontemporer, di mana interdependensi ekonomi dan politik semakin kompleks, melampaui paradigma tradisional *zero-sum game* (Keohane, R. O., & Nye, 2012).

Tabel 1. 1 Grafik Produksi Nikel Indonesia Tahun 2016-2021

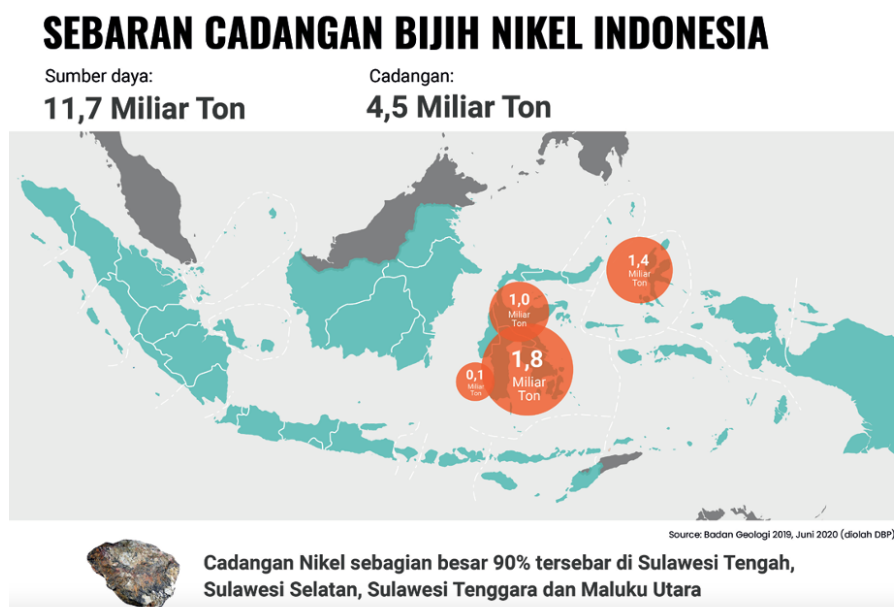


Sumber: Diolah oleh penulis (Radhica, D.D., dkk., 2023)

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan produksi nikel Indonesia dari tahun 2016 hingga 2021. Dalam kurun waktu tersebut, terlihat tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Produksi yang awalnya berada di bawah 200.000 metrik ton pada tahun 2016, terus meningkat tajam hingga mencapai puncaknya di tahun 2021, di mana jumlah produksi menyentuh angka 1.000.000 metrik ton. Angka ini mencerminkan potensi besar Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam industri nikel global.

Pertumbuhan produksi nikel ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga merepresentasikan pasar potensial yang menjanjikan bagi produsen EV global. Lebih dari itu, kekayaan sumber daya alam Indonesia terutama nikel sebagai komponen krusial dalam produksi baterai EV menjadikannya aktor strategis dalam rantai pasok global

kendaraan listrik (Widyasari, A., Hasibuan, S., & Sumardi, 2021). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dalam Siaran Pers Nomor 499.Pers/04/SJI/2023 tanggal 18 Oktober 2023 mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam komoditas nikel, yang menjadikannya salah satu daya tarik utama bagi investor. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia menyumbang sekitar 23% dari total cadangan global. Sebagaimana Gambar 1, secara rinci, sumber daya nikel di Indonesia mencapai 11,7 miliar ton bijih, sementara cadangannya tercatat sebesar 4,5 miliar ton bijih. Sumber daya ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Potensi ini menjadikan nikel Indonesia sebagai komoditas yang sangat menjanjikan dan berpeluang besar untuk menarik minat investasi.



Gambar 1. 1 Sebaran Cadangan Bijih Nikel Indonesia

Sumber: Booklet Tambang Nikel Tahun 2020 oleh ESDM

Tiongkok, dengan keunggulan sebagai produsen EV terbesar dunia, memperlihatkan pendekatan yang komprehensif dalam ekspansi ke Indonesia. Melalui perusahaan-perusahaan seperti BYD, Shanghai Automotive Industry Corporation (General Motors, Wuling) dan Great Wall Motors, Tiongkok tidak hanya memasarkan produk jadi, tetapi juga mengembangkan ekosistem produksi terintegrasi dari penambangan mineral hingga manufaktur komponen (Li, X., Zhang, L., & Wu, 2023). Strategi ini sejalan dengan inisiatif *Belt and Road* (BRI) yang menekankan konektivitas infrastruktur dan integrasi ekonomi regional. Sementara itu, pendekatan Korea Selatan yang dimotori oleh Hyundai dan Kia cenderung berfokus pada segmentasi pasar premium dan investasi teknologi canggih, memanfaatkan citra merek global yang telah terbangun (Kim dan Lee, 2022).

Tabel 1. 2 Data Penjualan BEV Periode Januari-Desember 2024

Whole Sales BEV Berdasar Merek Periode Januari-Desember 2024		
Merek Mobil	Asal Negara	Jumlah
BYD	Tiongkok	15,429 Unit
Wuling	Tiongkok	13,117 Unit
Chery	Tiongkok	5,010 Unit
Morris Garage	Tiongkok	3,193 Unit
Hyundai	Korea Selatan	2,803 Unit
BMW	Jerman	679 Unit
Neta	Tiongkok	607 Unit
Citroen	Prancis	361 Unit
DFSK & Seres	Tiongkok	95 & 89 Unit
MINI	Inggris	212 Unit
KIA	Korea Selatan	101 Unit

Whole Sales BEV Berdasar Merek Periode Januari-Desember 2024		
Mercedes-Benz	Jerman	66 Unit
Toyota	Jepang	60 Unit
Mitsubishi	Jepang	58 Unit
Volvo	Swedia	53 Unit
Nissan	Jepang	10 Unit
Lexus	Jepang	4 Unit

Sumber: Gaikindo 2025

Berdasarkan data penjualan BEV oleh Gaikindo periode Januari-Desember 2024 terdapat dominasi merek dari Tiongkok dalam pasar kendaraan listrik Indonesia. Hal ini mencerminkan pertarungan tiga paradigma *green industry* yang berbeda. BYD dan Wuling, sebagai pelopor pasar dengan penjualan masing-masing 15,429 dan 13,117 unit, mengimplementasikan model industrialisasi hijau berbasis produksi massal yang terintegrasi dengan proyek infrastruktur berskala besar, sebagaimana terlihat dalam pengembangan kawasan industri terpadu di Sulawesi yang mengadopsi energi terbarukan (Sulaiman, F., Rahman, M. A., & Nasution, 2022). Pendekatan ini berhadapan langsung dengan strategi Korea Selatan melalui Hyundai yang lebih mengedepankan transfer teknologi, seperti terlihat dalam kolaborasi riset baterai dengan perguruan tinggi lokal Institut Teknologi Bandung yang membahas riset mengenai baterai daur ulang/*used battery energy storage system* (Amianti, 2021), meski realisasi penjualannya masih tertinggal di angka 2,803 unit. Di sisi lain, merek-merek premium Eropa seperti BMW dan Mercedes-Benz menghadapi tantangan berbeda. Meskipun menguasai teknologi baterai mutakhir (Schmidt, 2023), penjualan mereka yang hanya mencapai 679 dan 66 unit menunjukkan keterbatasan model berbasis inovasi tinggi di pasar yang masih

sangat sensitif terhadap harga dan infrastruktur pendukung. Laporan *International Energy Agency* (2024) mengkonfirmasi bahwa kurangnya stasiun pengisian cepat yang memenuhi standar Eropa menjadi salah satu faktor penghambat utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia dalam menghadapi penetrasi produk kendaraan listrik EV global, dengan menggunakan perspektif *complex interdependence*. Studi ini mengeksplorasi dinamika hubungan antara Indonesia dengan negara-negara eksportir EV, khususnya dalam konteks persaingan dan kerja sama di sektor industri kendaraan listrik. Rentang waktu 2019-2024 dipilih dalam penelitian ini karena merupakan periode strategis bagi Indonesia dalam membangun fondasi kebijakan infrastruktur EV. Tahun 2019 menandai Indonesia masuk ke era transisi ke energi hijau dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), yang menandai komitmen pemerintah dalam transisi energi bersih. Selain itu, periode ini juga bertepatan dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana pengembangan kendaraan listrik masuk kedalam agenda prioritas nasional, khususnya dalam kerangka ekonomi hijau dan penguatan industri berbasis sumber daya alam berkelanjutan. Dalam konteks global, periode ini menandai peningkatan tajam arus impor EV dari negara-negara maju ke kawasan Asia Tenggara salah satunya Indonesia. Melalui analisis komparatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi posisi tawar Indonesia, termasuk peran sumber daya alam, kebijakan industri, dan strategi ekonomi politik. Selain itu, penelitian

ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi dinamika tersebut terhadap posisi Indonesia dalam ekonomi politik global, khususnya dalam menghadapi transformasi industri otomotif dunia menuju mobilitas berkelanjutan. Pemahaman mendalam tentang fenomena ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi studi hubungan internasional, khususnya dalam konteks transisi energi dan persaingan industri global, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi gempuran produk EV global.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, Persaingan antara produsen EV dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tidak dapat dilihat hanya sebagai fenomena ekonomi belaka, melainkan juga mencerminkan kecanggihan *economic statecraft* yang diterapkan oleh berbagai aktor negara. Fenomena ini erat kaitannya dengan persaingan kepentingan antar negara. Tiongkok, melalui *Belt and Road Initiative* yang berskala besar dari hulu ke hilir, Korea Selatan, dengan pendekatan diplomasi teknologinya, hingga tekanan keberlanjutan oleh Amerika dan Uni Eropa. Aktor-aktor tersebut berusaha memperluas pengaruh mereka melalui instrumen ekonomi yang kompleks dan terstruktur. Oleh sebab itu penelitian ini memutuskan rumusan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana strategi ekonomi politik Indonesia dalam menanggapi masuknya EV?"

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan impor produk kendaraan elektrifikasi EV serta mengevaluasi posisi tawar Indonesia sebagai upaya kontra terhadap dinamika *zero-sum game* dalam persaingan global. Fokus penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat daya saing industri domestik, sekaligus meminimalkan dampak negatif dari penetrasi pasar produk impor.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Memberikan pemahaman mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi impor produk EV.
2. Memberikan evaluasi terhadap strategi yang diambil pemerintah serta menganalisis bagaimana dampaknya.
3. Memberikan alternatif rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam upaya optimalisasi pemanfaatan kekayaan alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

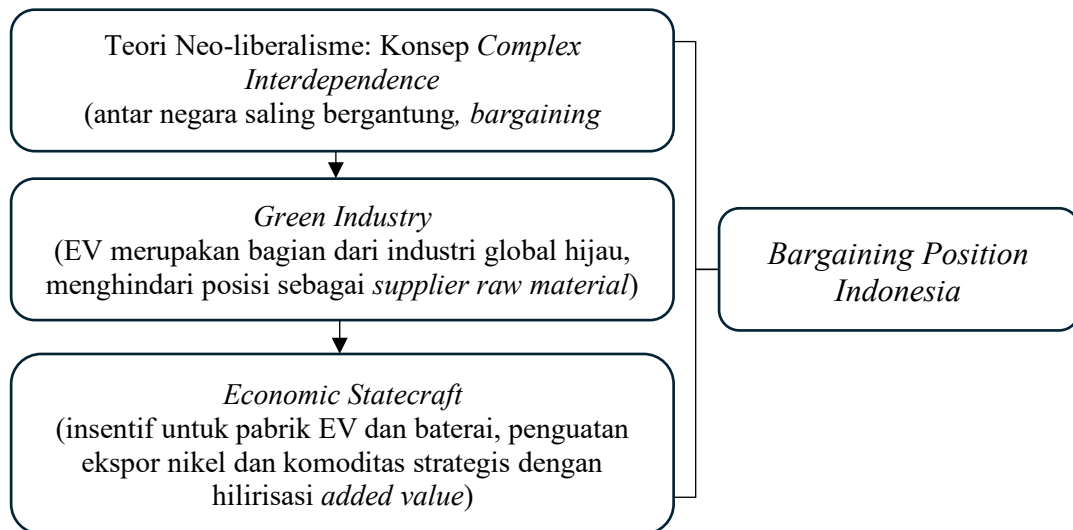
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang kebijakan publik, ekonomi politik internasional, serta pembangunan

industri, khususnya dalam konteks persaingan global di sektor kendaraan elektrifikasi (EV). Dengan mengkaji strategi pemerintah Indonesia dalam merespons tantangan impor produk EV dan menganalisis posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia, penelitian ini dapat memperluas wacana akademis terkait kebijakan industri strategis, ketergantungan asimetris (*asymmetrical interdependence*), dan dinamika *zero-sum game* pada negara berkembang. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan industri dalam negeri, alih teknologi, serta pembangunan berkelanjutan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi menghadapi persaingan global di sektor EV. Rekomendasi tersebut meliputi upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penguatan industri hilir, diversifikasi kerja sama strategis, serta peningkatan daya saing industri EV nasional. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri, dalam mengambil langkah strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Indonesia memanfaatkan potensi sumber daya alam secara maksimal, memperkuat posisi tawar di tingkat global, dan mewujudkan pembangunan industri yang inklusif dan ramah lingkungan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 1. 2 Visualisasi Kerangka Pemikiran

Sumber: Hasil analisis penulis

Berdasarkan gambar diatas penelitian ini menggunakan konsep *complex interdependence* sebagai kerangka analisis utama, dilengkapi dengan konsep-konsep pendukung seperti *green industry*, dan *economic statecraft*. Penetrasi EV di Indonesia terjadi dalam konteks *complex interdependence*, di mana *multiple channels* (hubungan G2G, B2B) beroperasi secara bersamaan, beragam isu (ekonomi, lingkungan, geopolitik) saling berkompetisi tanpa hierarki tetap, dan instrumen ekonomi menggantikan kekuatan militer dalam memproyeksikan pengaruh. Sebagai contoh Tiongkok dan Korea Selatan menerapkan *economic statecraft* untuk memperluas pengaruh mereka di Indonesia, dengan menggunakan kombinasi insentif investasi, perjanjian perdagangan, dan bantuan teknis. Namun, kedua negara tersebut menunjukkan pendekatan berbeda dalam implementasi *green industry*. Tiongkok cenderung berorientasi pada skala besar dengan integrasi

vertikal dari hulu ke hilir, sementara Korea Selatan lebih berfokus pada segmentasi pasar premium dan transfer teknologi.

Indonesia, sebagai respons, menerapkan pendekatan kebijakan publik yang terarah dan strategis untuk memaksimalkan keuntungan dari persaingan ini sambil meminimalkan risiko ketergantungan. Melalui kebijakan hilirisasi mineral dan diversifikasi mitra, Indonesia berupaya memperkuat posisi tawarnya dalam ekonomi politik global, memanfaatkan *asymmetrical interdependence* yang muncul dari kepemilikan sumber daya strategis. Kebijakan ini mencerminkan tindakan yang disengaja, terencana, dan saling terkait, sebagaimana dijelaskan oleh (Jann, W., & Wegrich, 2007), yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan industri yang berkelanjutan.

Kerangka konseptual ini akan digunakan untuk menganalisis posisi tawar Indonesia dalam arus impor EV terhadap posisi strategis Indonesia, dengan mempertimbangkan dimensi *economic gain*, *technological advancement*, *environmental sustainability*, dan *geopolitical positioning*. Dalam konteks ini, kebijakan publik Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman untuk mengatasi tantangan yang ada, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan harmonisasi antara kepentingan domestik dan dinamika global, sekaligus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil bersifat komprehensif dan terintegrasi.

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Kajian literatur milik Mukhlis, Rato, dan Anggono (2024) dalam Jurnal Pamator meneliti aspek yuridis konsesi pertambangan nikel di Indonesia untuk industri kendaraan listrik (EV) dengan pendekatan hukum lingkungan. Investigasi akademis ini mengkritisi inkonsistensi implementasi regulasi pertambangan nikel yang kerap mengesampingkan dimensi ekologis dan hak fundamental masyarakat, kendati secara normatif dirancang untuk meminimalisasi degradasi lingkungan. Studi tersebut memiliki relevansi signifikan dengan penelitian ini karena menekankan urgensi ekuilibrium antara pembangunan ekonomi dan preservasi ekosistem, khususnya dalam konteks pengembangan industri EV di Indonesia. Mukhlis dkk. menggarisbawahi bahwa pemerintah perlu memperkuat kerangka regulatori dan memastikan kepatuhan terhadap legislasi yang berlaku untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Mukhlis, M., Ismawati, I., Sillia, N., Fitrianti, S., Ukrita, I., Wisra, R. F., Rafli & Hendriani, R., Hanum, L., Ibrahim, H., Nofianti, S., Marta, A., & Sari, 2024). Argumentasi ini berkesesuaian dengan fokus penelitian ini dalam menganalisis strategi kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi tantangan penetrasi impor produk EV serta mengevaluasi posisi strategis Indonesia dalam kompetisi global.

Studi komprehensif oleh Humayro dan Virgianita (2024) dalam Hasanuddin *Journal of Strategic and International Studies* mengeksplorasi dinamika dan implementasi ekosistem EV di Indonesia, dengan penekanan pada kolaborasi strategis dengan negara-negara produsen EV seperti China, Korea Selatan, dan Jepang. Penelitian tersebut mengaplikasikan teori *national interest* untuk

mengelaborasi kepentingan ekonomi Indonesia dalam mengembangkan industri EV, terutama melalui optimalisasi cadangan nikel nasional. Humayro dan Virgianita menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi substansial dalam produksi baterai EV, keterbatasan kapasitas teknologi mengharuskan kolaborasi dengan negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif di bidang teknologi (Humayro, A., & Virgianita, 2024). Temuan ini berkontribusi signifikan terhadap penelitian ini, yang bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan Indonesia dalam menghadapi persaingan global di sektor EV, termasuk tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan meningkatkan daya tarik investasi asing.

Analisis sistematis yang dilakukan Anugrah dkk. (2024) dalam *Journal of Enterprise Information Management* menginvestigasi tantangan dan prospek adopsi EV di Indonesia menggunakan pendekatan metodologis *Multi-Level Perspective* (MLP). Penelitian tersebut mengidentifikasi variabel-variabel sosio-teknis yang berdampak pada transisi dari kendaraan konvensional berbahan bakar fosil/*internal combustion engine* (ICE) menuju EV, mencakup aspek kebijakan pemerintah, infrastruktur teknologi, dan kesiapan adaptif masyarakat. Anugrah dkk. menekankan signifikansi insentif fiskal pemerintah dan pengembangan infrastruktur *charging station* sebagai determinan akselerasi adopsi EV. Kesimpulannya, penelitian ini memiliki relevansi substansial dengan studi yang sedang dilakukan, yang juga berfokus pada analisis strategis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi persaingan impor produk EV dan mengevaluasi posisi daya tawar Indonesia. Studi ini memberikan perspektif komprehensif tentang

bagaimana intervensi kebijakan dan pengembangan infrastruktur dapat mempengaruhi daya kompetitif Indonesia dalam industri EV global.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh (Setiawan, 2022), mengeksplorasi efektivitas instrumen kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi adopsi EV dengan mengimplementasikan pendekatan dinamika sistem (*system dynamics*) dan kerangka analisis kebijakan komprehensif. Studi tersebut mengidentifikasi determinan signifikan berupa pengurangan beban fiskal pada pembelian dan kepemilikan EV serta peningkatan kapasitas teknologi baterai dan perluasan jarak tempuh sebagai faktor fundamental dalam meningkatkan daya tarik EV. Hasil simulasi model mendemonstrasikan bahwa insentif fiskal berupa pemotongan pajak memberikan efektivitas yang lebih substansial dibandingkan dengan insentif harga pengisian daya, khususnya dalam konteks ketika perkembangan teknologi EV mengalami disparitas. Meskipun demikian, penurunan emisi CO₂ tetap tidak mencapai target 2030 yang disebabkan oleh tingginya faktor emisi listrik di Indonesia, sehingga transisi ke energi bersih dalam sistem pembangkit listrik menjadi rekomendasi yang bersifat imperatif. Kontribusi metodologis penelitian ini terletak pada integrasi model difusi Bass dengan analisis kebijakan untuk mengevaluasi dinamika adopsi EV secara holistik.

Artikel milik (Chandra, R., & Aulia, 2022) mengevaluasi hambatan struktural dalam adopsi EV di Indonesia dengan mengaplikasikan metodologi *Grey Ordinal Priority Approach* (OPA-G), suatu pendekatan *multi-criteria decision-making* yang mampu mengakomodasi ketidakpastian data dalam analisis. Hasil investigasi mengindikasikan tiga hambatan dominan: biaya akuisisi awal EV

yang tinggi, infrastruktur pengisian daya yang belum kuat, dan insentif pemerintah yang kurang kompetitif. Kendati Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam aspek sumber daya bahan baku baterai, keterbatasan kapasitas teknologi dan ketergantungan terhadap komponen impor berkontribusi pada kompleksitas permasalahan harga. Studi tersebut merekomendasikan ekstensi subsidi harga, akselerasi pengembangan infrastruktur, dan intensifikasi sosialisasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran publik. Signifikansi akademis penelitian ini terletak pada implementasi metodologi OPA-G yang inovatif untuk memprioritaskan hambatan-hambatan, serta menekankan urgensi formulasi paket kebijakan yang terintegrasi yang mengharmonisasikan insentif, kerangka regulasi, dan investasi teknologi guna mengkatalisasi transisi energi yang berkelanjutan.

Berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif dari kelima jurnal di atas, teridentifikasi bahwa diskursus akademis mengenai EV di Indonesia telah berkembang menjadi kajian *multi-dimensional* yang meliputi aspek regulasi pertambangan, kebijakan adopsi, hambatan implementasi, dan kerja sama internasional. Mukhlis et al. (2024) dan Setiawan et al. (2022) menggarisbawahi pentingnya kerangka regulasi yang efektif, sementara Candra (2022) dan Anugrah et al. (2024) memberikan perspektif tentang hambatan struktural dan dinamika sosio-teknis dalam adopsi EV. Humayro dan Virgianita (2024) melengkapi diskursus dengan dimensi kolaborasi internasional yang menjadi imperatif dalam pengembangan ekosistem EV di Indonesia. Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika EV di

Indonesia, terdapat celah akademis yang belum teridentifikasi secara komprehensif, khususnya terkait posisi tawar Indonesia dalam dinamika global industri EV.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan perspektif *green industry*, *economic statecraft*, dan *interdependency complex* untuk menganalisis *bargaining position* Indonesia dalam ekosistem global EV. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung memposisikan Indonesia sebagai entitas pasif dalam rantai nilai global EV, penelitian ini mengartikulasikan proposisi bahwa Indonesia memiliki keunggulan posisi tawar strategis berupa cadangan nikel yang substansial bahan baku esensial dalam produksi baterai EV. Penelitian ini menawarkan paradigma baru dalam memahami posisi Indonesia, bukan sekadar sebagai pasar potensial atau destinasi investasi, melainkan sebagai aktor strategis yang memiliki kapabilitas untuk menegosiasikan kepentingan nasionalnya dalam arsitektur global industri EV. Analisis ini menjadi semakin relevan mengingat intensifikasi kompetisi geopolitik antara negara-negara produsen EV dan urgensi transisi energi global, di mana Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menentukan arah perkembangan industri EV secara global melalui optimalisasi posisi tawarnya.

1.5.2 Neo-liberal

Neo-liberalisme berdasarkan pemikiran Joseph Nye dan Robert Keohane, menekankan pada pentingnya interdependensi kompleks sebagai kerangka analisis untuk memahami dinamika hubungan antarnegara. Konsep ini menyoroti bahwa hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh isu-isu keamanan tradisional (*high politics*), tetapi juga oleh isu-isu ekonomi, lingkungan, dan teknologi (*low*

politics) yang saling terkait (Keohane & Nye, 2012). Neo-liberalisme berargumen bahwa kerja sama internasional dapat tercapai melalui mekanisme institusi, norma, dan jaringan yang memfasilitasi interaksi antar aktor, baik negara maupun non-negara (Nye, 2011).

Dalam konteks penelitian ini, neoliberalisme dioperasionalkan sebagai teori untuk menganalisis bagaimana interdependensi ekonomi antara Indonesia dan negara-negara produsen kendaraan listrik EV global mempengaruhi posisi tawar Indonesia. Interdependensi ini tercermin dalam arus impor komponen EV dan investasi asing yang membawa teknologi serta modal ke Indonesia. Menurut perspektif neoliberal, kerja sama dalam bentuk investasi dan transfer teknologi dapat menciptakan *win-win solution*, di mana Indonesia mendapatkan akses terhadap teknologi canggih, sementara investor asing memperoleh keuntungan ekonomi dari pasar yang potensial (Keohane, 1984).

Namun, interdependensi ini juga menciptakan asimetri kekuatan yang mempengaruhi bargaining position Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan modal asing, sementara negara-negara maju seperti Tiongkok dan Korea Selatan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan dan arah industri EV di Indonesia melalui investasi mereka (Wu, 2021a). Oleh karena itu, neo-liberalisme menyoroti pentingnya peran institusi dan kebijakan domestik dalam memitigasi asimetri ini, misalnya melalui regulasi yang mendorong lokal konten (*local content requirements*) atau insentif untuk pengembangan kapasitas lokal (Zhang, X., Zhang, L., & Fung, 2021). Neo-liberalisme dalam penelitian ini dioperasionalkan

sebagai kerangka analisis yang menekankan pada interdependensi ekonomi, peran institusi, dan strategi kerja sama untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menghadapi arus impor dan investasi EV global.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Complex Interdependence

Complex interdependence merupakan konsep fundamental dalam hubungan internasional yang menggambarkan jaringan hubungan multikanal yang kompleks dan saling tergantung antara negara-negara, aktor non-negara, dan sistem global (Keohane & Nye, 1977). Dalam konteks industri kendaraan listrik, konsep ini menjelaskan mekanisme interaksi rumit yang melampaui paradigma tradisional hubungan antar-negara, di mana kepentingan ekonomi, teknologi, dan lingkungan saling berdinamika (Keohane, 1984).

Complex interdependence ditandai oleh tiga karakteristik utama. Pertama, *multiple channels of contact* yang mencakup hubungan antar-pemerintah, *trans-governmental*, dan *trans-national*. Terdapat interaksi antar aktor di tingkat domestik maupun global, pemerintah tidak hanya melakukan negosiasi dengan produsen EV namun juga dengan perusahaan multinasional, lembaga keuangan, dan organisasi internasional seperti UNEP. Di tingkat transnasional, perusahaan baterai di Indonesia yaitu PT HKML Battery yang merupakan *joint venture* dengan LG Energy Solution berkolaborasi dengan pemasok bahan baku global, sementara itu universitas lokal bekerja sama dengan institusi riset asing demi pengembangan

teknologi EV. Jaringan ini memperkuat posisi tawar Indonesia karena memunculkan akses terhadap investasi, teknologi, pangsa pasar ekspor, dan pastinya mengurangi ketergantungan pada satu mitra tunggal. Namun, tantangan ada pada koordinasi kebijakan yang konsisten antar aktor dalam standarisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Kedua, *absence of hierarchy of issues* di mana tidak ada prioritas tunggal dalam agenda hubungan internasional. Isu ekonomi, isu lingkungan, dan keamanan nasional saling beririsan dalam agenda politik. Di satu sisi, hal ini mendorong industrialisasi EV dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi impor bahan bakar. Di sisi lain, adanya tekanan global untuk mengurangi emisi karbon memaksa percepatan EV, meskipun infrastruktur di Indonesia belum sepenuhnya memadai (Indonesia Energy Transition Outlook 2024 IESR Institute for Essential Services Reform). Sementara itu, terdapat ketergantungan pada impor komponen EV dari China menimbulkan kekhawatiran pada sektor keamanan nasional, terutama pada rantai pasok (Indonesia's Battery Industrial Strategy, 2022). Disini tantangan sebenarnya bagi pemerintah untuk mengolaborasikan kepentingan diatas dengan menerapkan insentif fiskal bagi produsen EV, mengatur standar terkait emisi karbon, dan membatasi kepemilikan asing di sektor-sektor strategis (Perpres No. 55, 2019).

Ketiga, *minimal use of military force* sebagai instrumen utama terakhir, dimana adanya dominasi non-militer dalam lanskap industri kendaraan listrik, kompleksitas ini terwujud melalui dominasi seperti diplomasi ekonomi, kerjasama teknologi, dan regulasi. Indonesia mengamankan posisi tawar dengan

memanfaatkan negosiasi perdagangan dalam perjanjian seperti CEPA dengan Uni Eropa untuk ekspor nikel sebagai bahan baku baterai, bukan melalui ancaman bersenjata oleh militer. Alih-alih menggunakan kekuatan militer, Indonesia merespon dengan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)/*Local Content Requirement* dan larangan bagi perusahaan pertambangan mengekspor nikel mentah demi memaksakan investasi manufaktur dalam negeri (UU No. 3 Tahun 2020). Walaupun mendapatkan tekanan geopolitik dibuktikan dengan adanya sengketa WTO dengan Uni Eropa terkait larangan nikel, ini menunjukkan bagaimana negara mengandalkan instrumen *economic statecraft* dan hukum internasional untuk memperkuat posisi tawar.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menegaskan bahwa dalam era transformasi energi, *complex interdependence* tidak sekadar menggambarkan keterhubungan ekonomi, melainkan representasi dari sistem kompleks di mana kepentingan teknologi, lingkungan, dan geopolitik saling berinteraksi secara simultan (UNCTAD, 2021). Bagi Indonesia, hal ini berarti navigasi strategis dalam ekosistem global yang membutuhkan kemampuan adaptasi, diplomasi multi-aktor, dan pendekatan komprehensif dalam mendefinisikan *bargaining position*-nya. Sebagai peneliti dalam memaknai *complex interdependence* sebagai paradigma fundamental yang mengungkap kompleksitas sebenarnya dari transformasi industri global. Konsep ini tidak sekadar menjelaskan keterhubungan ekonomi, melainkan membongkar mekanisme kuasa yang tersembunyi di balik jaringan teknologi, investasi, dan diplomasi lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, *complex interdependence* menghadirkan peluang maupun tantangan strategis. Dimana kedaulatan teknologi tidak lagi dapat dimaknai secara konvensional, melainkan melalui kemampuan navigasi dalam ekosistem global yang *multistreaming*. Posisi Indonesia tidak ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi semata, tetapi oleh kapasitas adaptasi, keluwesan diplomatis, dan kemampuan untuk menciptakan ruang negosiasi dalam jaringan kompleks aktor global. Indonesia dipaksa untuk merancang strategi yang simultan dan multidimensional. Bukan sekadar menjadi penerima pasif teknologi, tetapi mampu mengkonstruksi posisi strategis melalui jejaring kompleks yang melintasi batas-batas tradisional negara-bangsa. Kemampuan untuk membaca, memahami, dan memanfaatkan kompleksitas hubungan internasional dalam industri kendaraan listrik akan menjadi determinan kunci apakah Indonesia akan menjadi subjek atau objek dalam transformasi teknologi global.

1.6.1.2 Green Industry

World Bank (2022) mendefinisikan *green industry* sebagai praktik manufaktur yang meminimalkan polusi dan menggunakan sumber daya secara efisien. Konsep ini meliputi penerapan teknologi dan teknik produksi yang menurunkan emisi karbon, meminimalkan limbah, serta mengoptimalkan penggunaan material dan energi. Lebih dari sekadar pendekatan teknis, *green industry* merupakan paradigma pembangunan industrial berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam sistem produksi dan manajemen industri (OECD, 2020). Dengan mengadopsi *green*

industry, pelaku industri tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing.

Secara global, implementasi *green industry* bervariasi tergantung pada konteks nasional dan strategi pembangunan masing-masing negara. Di Uni Eropa, Jerman dan Belanda menjadi pelopor dengan pendekatan komprehensif melalui regulasi ketat, insentif pajak hijau, dan transisi energi sistematis. Uni Eropa menargetkan pengurangan emisi 55% pada 2030 dan netralitas karbon pada 2050, dengan fokus pada manufaktur hijau, energi terbarukan, dan mobilitas rendah karbon (European Commission, 2020). Sementara itu, Amerika Serikat mengandalkan kombinasi insentif federal dan inisiatif negara bagian, seperti program agresif California di sektor otomotif dan energi terbarukan, yang berbasis pasar melalui kredit pajak dan subsidi (U.S. Department of Energy, 2021). Di Asia, Jepang dan Korea Selatan memimpin dengan mengintegrasikan *green industry* ke dalam strategi reindustrialisasi, khususnya dalam teknologi hijau dan kendaraan listrik (UNIDO, 2019).

Dalam konteks EV, *green industry* mencakup seluruh rantai nilai produksi, mulai dari ekstraksi bahan baku, manufaktur, hingga daur ulang dengan fokus pada minimalisasi jejak karbon dan efisiensi sumber daya (International Energy Agency, 2021). Implementasinya meliputi empat dimensi:

1. Desain produk berkelanjutan, seperti pengembangan kendaraan dengan komponen daur ulang dan jejak karbon minimal.
2. Manufaktur bersih, melalui proses produksi yang meminimalkan energi, air, dan bahan kimia berbahaya.

3. Manajemen rantai pasok berkelanjutan, dengan memastikan standar lingkungan dan sosial dari hulu ke hilir.
4. Energi terbarukan, baik dalam manufaktur maupun infrastruktur pengisian daya.

Keikutsertaan Indonesia pada konvensi internasional terkait dengan pengurangan emisi ditunjukkan dengan meratifikasi *paris agreement* yang pengesahannya tertuang pada UU No. 16 Tahun 2016, kontribusi Indonesia ditentukan secara nasional dengan tujuan mereduksi emisi gas rumah kaca. Dalam bisnis pertambangan nikel menghasilkan emisi karbon tinggi yang berimbas pada naiknya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, khususnya pada proses *smelting* dan *refining* yang menggunakan bahan bakar batu bara. Kerusakan lainnya berimbas pada lingkungan seperti pembalakan hutan (*deforestasi*), pencemaran air dan tanah akibat proses *tailing*. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), tertuang pada UU No. 6 Tahun 1994 dengan ini Indonesia secara berkala merancang kebijakan dan inventarisasi emisi karbon nasional yang mencakup energi dan industri ekstraktif.

Perihal parameter *green industry*, berdasarkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak (BME STB) yang diregulasi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan No. 4 Tahun 2014, mengatur kadar maksimum emisi pengolahan bijih nikel yang boleh dihasilkan industri pertambangan nikel meliputi nikel mate, tanur reduksi, tanur pengering, tungku listrik, dan pengering produk, dalam industri nikel terdapat pada proses emisi tinggi khususnya pengolahan bijih menjadi logam nikel atau *smelting* (*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4*

Tahun 2014, n.d.). Selain itu, terdapat standar dan sertifikasi internasional (ISO) ISO 14064 yang mengatur pelaporan dan verifikasi gas rumah kaca (ISO, 2018) serta ISO 50001 terkait regulasi sistem manajemen energi demi meningkatkan efisiensi dan menurunkan emisi (ISO 50001, 2018). Namun ada beberapa industri nikel yang menetapkan *initiative for responsible mining assurance* (IRMA), standar internasional yang menetapkan praktik pertambangan secara bertanggung jawab baik bagi lingkungan maupun sosial. IRMA mencakup aspek keselamatan kerja (K3), hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan, transparansi, pengurangan emisi karbon. Hal-hal tersebut dirumuskan demi memastikan pertambangan beroperasi secara berkelanjutan serta etis dalam rantai pasok global. Sebagai contoh perusahaan pelopor di Indonesia yang menerapkan IRMA yaitu Harita Nickel menjalani audit IRMA untuk tambang, smelter, dan *refinery* (IRMA Standard for Responsible Mining IRMA Standard for Responsible Mining Photo Credits, 2018).

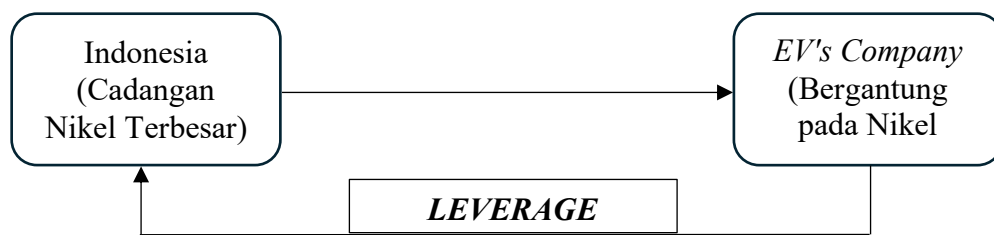
Indonesia sendiri masih dalam tahap transformasi menuju *green industry*, pemerintah telah merancang kerangka kebijakan melalui Peraturan Menteri Perindustrian tentang *Green Industry*, yang mencakup kriteria keberlanjutan dan insentif bagi industri ramah lingkungan. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan pendanaan masih menghambat implementasi penuh (Kementerian Perindustrian RI, 2022). Seperti ditegaskan UNIDO (2019), *green industry* bukan sekadar adopsi teknologi hijau, melainkan transformasi sistemik yang memadukan keberlanjutan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Sehingga *green industry* dalam sektor EV tidak hanya mendorong

inovasi teknis, tetapi juga membutuhkan komitmen kebijakan, kolaborasi global, dan pendekatan holistik untuk mencapai pembangunan industri yang berkelanjutan.

1.6.1.3 Economic Statecraft

Economic statecraft didefinisikan sebagai penggunaan instrumen ekonomi dan kekuatan pasar oleh negara untuk mencapai tujuan strategis dalam hubungan internasional (Baldwin, 1985a). Dalam konteks industri kendaraan listrik, konsep ini mencakup kompleksitas interaksi antara kebijakan ekonomi, diplomasi teknologi, dan kepentingan geopolitik (Drezner, 2015). Menurut Strange (1988), *economic statecraft* merupakan mekanisme di mana negara menggunakan sumber daya ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi dinamika kekuasaan global, termasuk melalui regulasi perdagangan, kebijakan investasi, dan strategi pengembangan industri strategis.

Dalam lanskap industri kendaraan listrik, *economic statecraft* berlangsung melalui beragam instrumen, pemberian insentif investasi, pengembangan kebijakan nasional, pembatasan transfer teknologi, negosiasi perjanjian perdagangan, serta penciptaan ekosistem inovasi yang kompetitif (Gilpin, 2001). *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) menekankan bahwa *economic statecraft* di era transformasi energi tidak sekadar tentang kontrol ekonomi, melainkan upaya sistematis untuk mendefinisikan posisi strategis dalam rantai nilai global yang sedang berevolusi (UNCTAD, 2022).



Gambar 1. 3 Relasi Indonesia dengan Perusahaan Kendaraan Listrik

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan gambar tersebut, relasi strategis antara Indonesia dan perusahaan EV global terbentuk melalui ketergantungan bilateral pada nikel sebagai komoditas kritis. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia (USGS, 2023), Indonesia memegang posisi *leverage* dalam rantai pasok baterai EV, sementara produsen EV bergantung pada stabilitas pasokan bahan baku ini untuk memenuhi target produksi mereka. Ketergantungan timbal-balik ini menciptakan hubungan saling menguntungkan, di mana kepentingan ekonomi nasional Indonesia berhadapan dengan strategi industrialisasi hijau global. Peneliti memaknai *economic statecraft* sebagai instrumen strategis fundamental dalam mengartikulasikan kepentingan nasional di era transformasi energi global. *Economic statecraft* tidak sekadar merupakan mekanisme diplomasi ekonomi konvensional, melainkan representasi kompleks dari kemampuan adaptasi dan negosiasi suatu negara dalam menghadapi *disruption* teknologi dan geopolitik. Dalam konteks Indonesia, hal ini mensyaratkan pendekatan multidimensional yang mampu menyinergikan kapasitas diplomatik, kemampuan inovasi teknologi, dan strategi pengembangan ekosistem industri yang responsif. Posisi Indonesia di tengah arus impor dan investasi kendaraan listrik membutuhkan *economic statecraft* yang tidak hanya reaktif, tetapi proaktif dalam mendefinisikan ruang

negosiasi, menciptakan keunggulan komparatif, dan memetakan ulang peta kekuatan ekonomi di kawasan.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Complex Interdependence

Complex Interdependence dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan dinamika hubungan internasional Indonesia dalam menghadapi arus impor dan investasi EV global, bagaimana hubungan internasional kontemporer tidak lagi didominasi oleh logika kekuatan militer, melainkan oleh jaringan ekonomi, pertukaran politik, dan interaksi multi-aktor. Merujuk pada konsep Joseph Nye dan Robert Keohane (1977) dalam karya *Power and Interdependence* terdapat tiga unsur utama, meliputi; Pertama, dimensi *multi-channel connectivity* tercermin dari cara Indonesia membangun kemitraan strategis tidak hanya dengan negara-negara produsen EV seperti China dan Amerika Serikat, tetapi juga dengan korporasi multinasional (Tesla, BYD) dan organisasi internasional (IEA, ASEAN). Kemitraan ini memfasilitasi aliran investasi dan transfer teknologi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai hub industri baterai berbasis nikel; Kedua, karakteristik *absence of hierarchy among issues* terlihat dari bagaimana isu-isu ekonomi (larangan ekspor nikel), politik (perjanjian perdagangan), dan lingkungan (transisi energi) saling beririsan dalam kebijakan EV Indonesia. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel melalui UU No. 3/2020, misalnya, tidak hanya bertujuan mendorong industrialisasi dalam negeri tetapi juga menciptakan ketergantungan asing pada rantai pasok Indonesia, yang

pada gilirannya meningkatkan daya tawar negara; Ketiga, prinsip *minimal use of military force* dalam interdependensi kompleks menjelaskan mengapa Indonesia mengedepankan instrumen ekonomi seperti insentif fiskal dan persyaratan *local content* (TKDN) untuk menarik investasi EV, alih-alih menggunakan tekanan geopolitik konvensional. Dinamika ini menciptakan hubungan timbal balik (*reciprocal gain*) di mana Indonesia mendapatkan investasi dan teknologi, sementara aktor global memperoleh akses ke sumber daya nikel dan pasar domestik yang besar. Namun, interdependensi ini bersifat asimetris Indonesia memiliki *leverage* signifikan melalui kontrol atas cadangan nikel terbesar dunia, yang memungkinkannya mempengaruhi struktur pasar global meski tetap bergantung pada teknologi dan modal asing.

1.6.2.2 Green Industry

Green industry dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai paradigma pembangunan industri yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam seluruh rantai nilai produksi EV, mulai dari ekstraksi bahan baku, proses manufaktur, hingga daur ulang baterai (UNIDO, 2021). Konsep ini tidak hanya berfokus pada reduksi emisi karbon selama operasional kendaraan, tetapi juga menekankan pentingnya efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan transisi energi terbarukan dalam keseluruhan ekosistem industri (IEA, 2023). Di Indonesia, *green industry* diwujudkan melalui tiga dimensi utama; Pertama, ekstraksi dan pengolahan nikel yang berkelanjutan, di mana penerapan teknologi ramah lingkungan seperti *High-Pressure Acid Leaching* (HPAL) dan pemanfaatan energi terbarukan dalam proses *smelting* menjadi indikator utama;

Kedua, rantai pasok hijau, yang mencakup standar lingkungan dalam produksi baterai dan komponen EV, termasuk penurunan jejak karbon melalui penggunaan energi bersih di pabrik-pabrik perakitan; Ketiga, ekonomi sirkular untuk baterai EV, dengan program daur ulang material baterai bekas dan pengembangan *second-life applications* oleh PT Hyundai LG Indonesia untuk memperpanjang siklus hidup produk.

Implementasi *green industry* di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan, seperti insentif fiskal untuk investasi berkelanjutan dan persyaratan kandungan lokal (TKDN) yang mengikat dengan standar lingkungan. Selain itu, kolaborasi dengan aktor global yang memiliki komitmen lingkungan, seperti Tesla dengan program *gigafactory* dan Volkswagen, turut mempercepat adopsi praktik industri hijau. Dengan pendekatan ini, *green industry* tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi komitmen iklim internasional (*paris agreement*), tetapi juga strategi untuk meningkatkan daya saing industri EV Indonesia di pasar global yang semakin mengutamakan keberlanjutan. Hal ini dapat dibuktikan dengan faktor kebijakan yang memainkan peran sentral dalam percepatan *green industry*. Peraturan Pemerintah No. 28/2021 tentang Standar Industri Hijau menetapkan persyaratan ketat bagi produsen EV, sementara insentif fiskal melalui Perpres No. 55/2019 mendorong investasi dalam teknologi bersih sebesar \$15 miliar dalam dua tahun terakhir (Kemenperin, 2022, hlm. 34).

1.6.2.3 Economic Statecraft

Economic statecraft dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai kerangka strategis pemanfaatan instrumen ekonomi oleh negara untuk mencapai tujuan

politik dalam hubungan internasional, khususnya dalam merespons dinamika industri kendaraan listrik global. Menurut Baldwin (1985), konsep ini menekankan pada penggunaan sumber daya ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan aktor lain dalam sistem internasional. Indonesia mengombinasikan pendekatan proteksionis dan insentif ekonomi sebagai bagian dari strategi *economic statecraft*-nya. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel melalui Undang-Undang No. 3/2020 merupakan contoh nyata dari diplomasi koersif yang bertujuan memaksa investor asing membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri. Warburton (2020) mengidentifikasi kebijakan semacam ini sebagai manifestasi *resource nationalism* yang bertransformasi menjadi keunggulan industri. Sementara itu, paket insentif fiskal melalui Perpres No. 55/2019 merepresentasikan pendekatan *positif economic statecraft* melalui penawaran berbagai kemudahan bagi investor yang memenuhi persyaratan lokal. Strategi Indonesia menunjukkan karakteristik unik dalam memanfaatkan kekuatan pasar dan sumber daya. Potensi pasar domestik yang besar, diproyeksikan mencapai 20 miliar dolar AS pada 2030 menurut McKinsey (2023), menjadi daya tarik utama bagi investor global. Di saat yang sama, penguasaan atas 22 persen cadangan nikel global (USGS, 2023) menempatkan Indonesia sebagai simpul penting dalam rantai pasok baterai dunia. Kombinasi ini menciptakan ketergantungan asimetris yang menguntungkan posisi Indonesia dalam percaturan global.

Perkembangan terakhir menunjukkan perluasan strategi *economic statecraft* Indonesia melalui berbagai kemitraan internasional. Kolaborasi dengan perusahaan global seperti LG Chem dan CATL dalam pengembangan pabrik baterai tidak

hanya tentang transfer teknologi, tetapi juga upaya membangun aliansi strategis di tengah persaingan teknologi hijau global. Hurrell (2022) mencatat bahwa negara berkembang semakin menggunakan pendekatan semacam ini untuk mengamankan posisi dalam arsitektur ekonomi global yang terus berubah. Dalam konteks ini, kebijakan industri EV Indonesia merepresentasikan bentuk kontemporer dari *economic statecraft* yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga kepemimpinan teknologi di sektor strategis.

1.7 Argumen Penelitian

Strategi yang dilakukan Indonesia dalam menanggapi masuknya EV mengadopsi pendekatan ekonomi politik berbasis interdependensi positif dalam merespons penetrasi EV global. Strategi ini memanfaatkan keunggulan komparatif sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar dunia, Pemerintah mengoptimalkan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan impor dan secara bertahap memperkuat industri domestik. Melalui kebijakan seperti larangan ekspor bijih nikel, Indonesia menciptakan hubungan simbiosis mutualistik dengan produsen global. Kebijakan ini mendorong investasi asing dalam fasilitas pemrosesan nikel di dalam negeri, yang pada gilirannya menghasilkan transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan memastikan investor memiliki akses prioritas terhadap bahan baku. Strategi *non-zero-sum* ini diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019, yang memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menstimulasi pasar domestik, seperti pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0%, subsidi pembelian, dan kemudahan impor komponen. Sementara itu, di sisi

permintaan, kebijakan pengadaan wajib EV untuk instansi pemerintah dan BUMN menciptakan pasar awal yang stabil.

Namun, implementasi strategi ini menghadapi tantangan, terutama terkait komitmen terhadap *green industry*. Meskipun ada upaya untuk mengembangkan teknologi smelter berbasis energi hijau, sebagian fasilitas pengolahan nikel masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga batu bara, yang menimbulkan kekhawatiran lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah merancang taksonomi investasi hijau yang mengklasifikasikan proyek berdasarkan dampak lingkungannya. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena masih mengakomodasi penggunaan batu bara dalam kategori transisi, yang menimbulkan perdebatan tentang komitmen nyata terhadap prinsip industri berkelanjutan. Secara keseluruhan, kombinasi kebijakan ini dirancang untuk membangun ekosistem industri yang kompetitif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan menggabungkan kontrol atas rantai pasok nikel, insentif terarah, dan intervensi permintaan, Indonesia memperkuat posisi tawarnya dalam rantai nilai global dan membangun fondasi industri EV yang kuat. Pendekatan ini mencerminkan *smart industrial policy* yang responsif terhadap dinamika pasar global sambil berorientasi pada penguatan kapasitas domestik.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Menurut Stake (2005), studi kasus instrumental bertujuan untuk

memberikan pemahaman mendalam terhadap isu tertentu atau merevisi generalisasi teoretis. Penelitian berfokus pada posisi tawar Indonesia di tengah arus impor dan investasi EV global sebagai kasus yang dapat memberikan wawasan mengenai dinamika interdependensi dalam kebijakan industri negara berkembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial yang melibatkan interaksi berbagai aktor dan kepentingan dalam lanskap kebijakan publik pada konteks hubungan internasional (Denzin & Lincoln, 2018). Penelitian ini juga bersifat analitis, dengan tujuan mengidentifikasi hubungan kausal antara pengembangan industri nikel sebagai *economic statecraft* dan posisi tawar Indonesia dalam industri EV global.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Indonesia, berpusat pada institusi pemerintah yang relevan dengan formulasi kebijakan industri EV dan nikel. Beberapa lokasi spesifik meliputi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selanjutnya, penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder, analisis dokumen, dan literatur yang relevan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dokumen kebijakan, regulasi, dan strategi yang telah diterbitkan oleh institusi pemerintah dan organisasi terkait, serta melakukan tinjauan pustaka untuk memahami konteks dan perkembangan terkini dalam industri nikel dan EV. Selain itu, wawancara dengan para ahli atau pemangku kepentingan dari tiap-tiap perwakilan dapat dilakukan secara langsung maupun

melalui *platform* daring untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan industri EV dan nikel di Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi para pemangku kepentingan kunci dalam ekosistem kebijakan dan industri EV di Indonesia, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria keahlian dan keterlibatan langsung dalam formulasi maupun implementasi kebijakan. Narasumber penelitian ini akan terdiri dari Penelitian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci untuk mendapatkan perspektif komprehensif mengenai strategi ekonomi politik Indonesia di sektor EV. Narasumber utama mencakup pejabat pemerintah dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, penelitian juga akan melibatkan perwakilan dari pelaku industri, baik BUMN maupun perusahaan multinasional yang bergerak di bidang nikel dan otomotif.

Untuk memperkaya analisis, pandangan dari asosiasi industri seperti Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) akan dipertimbangkan guna memahami dinamika sektor swasta. Pendapat akademisi dan pakar kebijakan publik dengan keahlian di bidang hubungan internasional dan ekonomi politik industri juga akan menjadi bagian penting dalam penelitian. Terakhir, masukan dari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu energi berkelanjutan dan pengembangan industri hijau

akan dilibatkan untuk memastikan adanya perspektif kritis dan berimbang. Dengan melibatkan beragam aktor ini, penelitian bertujuan untuk menggali wawasan mendalam dari berbagai sudut pandang, mulai dari pembuat kebijakan, pelaku bisnis, hingga pengamat independen. Pendekatan multi-pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang tantangan dan peluang Indonesia dalam menghadapi transformasi industri EV global.

Selain mengandalkan data primer dari para pemangku kepentingan, penelitian ini juga akan memanfaatkan sumber sekunder seperti jurnal akademik, artikel ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, dan dokumen kebijakan untuk memperdalam analisis. Sumber-sumber tersebut akan digunakan untuk melacak dinamika *bargaining position* Indonesia dalam pengembangan industri EV, termasuk faktor-faktor geopolitik, ekonomi, dan regulasi yang mempengaruhinya. Kajian literatur ini tidak hanya memverifikasi temuan dari wawancara, tetapi juga memperkaya konteks teoretis, terutama terkait strategi negosiasi negara berkembang dalam rantai nilai global dan peran sumber daya strategis seperti nikel. Dengan triangulasi data, penelitian ini bertujuan menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan kredibel.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif. Data primer bersifat emic yang memperhatikan pandangan narasumber bagaimana mereka memandang atau menafsirkan suatu fenomena, yaitu perspektif dan interpretasi dari para aktor yang terlibat langsung dalam proses kebijakan dan pengembangan industri EV, yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Data

sekunder mencakup dokumen kebijakan, regulasi, laporan industri, makalah akademik, serta publikasi media yang relevan dengan posisi tawar Indonesia dalam industri EV global dan pengembangan industri nikel domestik. Kedua jenis data ini bersifat komplementer dan digunakan untuk *triangulasi* guna meningkatkan validitas internal penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan pendekatan multi-sumber untuk memastikan validitas dan kedalaman analisis melalui kombinasi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan para pemangku kepentingan utama dalam ekosistem kendaraan listrik Indonesia, menggunakan metode wawancara mendalam yang dilakukan secara fleksibel baik melalui pertemuan tatap muka, *platform virtual*, maupun komunikasi tertulis. Cakupan narasumber meliputi seluruh spektrum aktor strategis, mulai dari pembuat kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, praktisi industri dari perusahaan nikel dan otomotif terkemuka, hingga pakar independen dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

Untuk memperkuat kerangka analisis, penelitian ini secara sistematis memanfaatkan berbagai sumber sekunder yang kredibel. Kajian literatur dilakukan terhadap dokumen kebijakan resmi, laporan perkembangan industri, publikasi akademik mutakhir, serta analisis strategis dari lembaga penelitian ternama. Proses kurasi sumber sekunder dilakukan secara selektif dengan fokus pada materi-materi yang secara substantif berkontribusi pada pemahaman tentang posisi tawar Indonesia dalam percaturan industri kendaraan listrik global. Sinergi antara data

primer dan sekunder ini tidak hanya memperkaya perspektif penelitian, tetapi juga memungkinkan verifikasi silang temuan untuk memastikan ketangguhan analisis. Pendekatan komprehensif dalam pengumpulan data ini dirancang untuk membangun landasan empiris yang kokoh, sekaligus memfasilitasi elaborasi argumentasi yang bernuansa dalam mengkaji dinamika *bargaining position* Indonesia. Integrasi berbagai sumber data diharapkan dapat menghasilkan temuan yang memiliki kedalaman penelitian dan juga relevan secara praktis bagi pengembangan industri kendaraan listrik nasional.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi konsep triangulasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan validitas temuan. Dalam perspektif Denzin, *triangulasi* tidak sekadar berarti penggunaan multi-metode, melainkan upaya sistematis untuk mengamati fenomena dari berbagai sudut pandang metodologis yang saling melengkapi (Kane & Denzin, n.d.). Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama pengumpulan data yang saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang strategi ekonomi politik Indonesia di sektor kendaraan listrik. Wawancara mendalam semi-terstruktur menjadi tulang punggung penelitian ini, dirancang khusus untuk menggali perspektif mendalam dari para pemangku kepentingan kunci. Protokol wawancara yang dikembangkan secara cermat memungkinkan eksplorasi menyeluruh terhadap berbagai aspek strategis, mulai dari dinamika kebijakan industri EV nasional, tantangan implementasi di lapangan, hingga strategi penguatan posisi tawar Indonesia. Durasi wawancara 60-90 menit per sesi memberikan ruang yang memadai untuk mengeksplorasi kompleksitas isu

sambil tetap menjaga fokus penelitian. Fleksibilitas format semiterstruktur memungkinkan peneliti mengikuti alur pemikiran informan sekaligus memastikan semua dimensi penting dibahas memadai.

Dilanjutkan dengan analisis dokumen sistematis berperan sebagai metode pendamping yang krusial, mencakup beragam dokumen kebijakan resmi seperti Perpres 55/2019 beserta peraturan turunannya, berbagai laporan industri dari asosiasi terkait, serta publikasi strategis dari kementerian dan lembaga pemerintah. Proses analisis dokumen tidak hanya berfungsi sebagai sumber data sekunder yang kaya, tetapi juga menjadi alat verifikasi penting untuk mengkonfirmasi dan melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara. Pendekatan ini memungkinkan untuk melacak evolusi kebijakan secara komprehensif, mengidentifikasi kesenjangan antara perumusan dan implementasi kebijakan, serta memetakan secara holistik posisi berbagai aktor dalam ekosistem industri EV nasional. Semua aktivitas wawancara akan direkam dengan izin informan dan ditranskripsikan untuk analisis lebih lanjut.

Kombinasi kedua metode ini menciptakan mekanisme saling menguatkan dalam pengumpulan data, di mana temuan dari wawancara dapat diverifikasi melalui dokumen resmi, sementara analisis dokumen mendapatkan konteks yang lebih hidup melalui penjelasan langsung para pelaku kebijakan dan industri. Pendekatan ini secara khusus dirancang untuk menangkap kompleksitas isu penelitian yang berada di persimpangan antara kebijakan publik, kepentingan industri, dan dinamika pasar global, sekaligus memastikan kedalaman dan validitas data yang diperoleh.

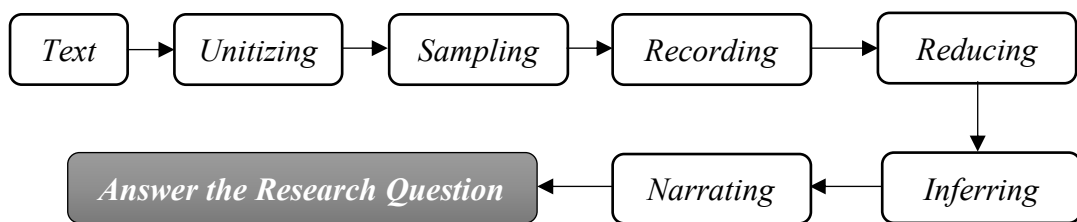
1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini akan berbasis pada teknik *content analysis* untuk menafsirkan temuan yang didasarkan kerangka konseptual *complex interdependence*, konsep *green industry*, dan *economic statecraft*. Pemilihan *content analysis* dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis pola, tema, makna yang terdapat dalam dokumen, teks, dan wawancara secara sistematis yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Krippendorff, 2004). Teknik ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memaknai fenomena sosial dikonstruksi dalam situasi tertentu melalui proses pengelompokan dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada kerangka teori, sebagaimana dijelaskan dalam *Components of Content Analysis* oleh Krippendorff (2004). Proses analisis dilakukan melalui sejumlah tahapan utama yang mempermudah dalam mengklasifikasikan, merumuskan konsep, mendiskusikan, dan menilai rancangan *content analysis* secara bertahap. Teknik ini mencakup beberapa tahapan:

- a. *Text*, merupakan data awal berupa gambar, suara, gerakan, atau simbol yang dapat diinterpretasikan. Disini *text* sebagai konstruksi makna, bukan objek mati.
- b. *Unitizing*, proses mengidentifikasi bagian, bagian dalam media, baik teks, gambar, dan suara yang memiliki relevansi dengan pertanyaan penelitian.
- c. *Sampling*, teknik untuk membatasi jumlah observasi agar tetap *manageable* namun tetap representatif terhadap keseluruhan data yang dianalisis.
- d. *Recording*, menghubungkan antara unit *text* yang telah diidentifikasi (*unitizing*) dengan makna yang ditafsirkan. Dalam proses ini

melibatkan pengkodean, atau pengkategorian informasi agar dapat dibandingkan dan dianalisis secara sistematis berbasis teori.

- e. *Reducing*, langkah menyaring data yang ada agar fokus pada data yang diperlukan dalam analisis.
- f. *Inferring*, proses mengaitkan informasi dalam *text* dengan makna atau fenomena yang tidak terlihat (*non-manifest*)
- g. *Narrating*, hasil pemaknaan dan analisis disusun dalam interpretasi peneliti berupa jawaban atas pertanyaan penelitian.



Gambar 1. 4 Kerangka Analisis dan Interpretasi Data

Sumber: (krippendorff, 2004)

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Untuk memastikan kualitas dan keandalan penelitian, terdapat beberapa kriteria *trustworthiness* yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (2013) meliputi; Kredibilitas (*credibility*) dicapai melalui keterlibatan jangka panjang dalam konteks penelitian, triangulasi metode dan sumber data, *peer debriefing* dengan rekan peneliti, serta *member checking*, di mana hasil analisis awal dikonfirmasi kembali kepada informan kunci; Transferabilitas (*transferability*) diperkuat melalui deskripsi mendalam mengenai konteks spesifik industri kendaraan listrik (EV) dan

nikel di Indonesia, yang memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi relevansi temuan dalam konteks lain; Dependabilitas (*dependability*) dijamin melalui audit trail/catatan aktivitas yang terperinci dan dokumentasi sistematis terhadap keputusan metodologis yang diambil selama proses penelitian; dan Konfirmabilitas (*confirmability*) diperoleh melalui reflektivitas peneliti yang dikembangkan dalam jurnal reflektif serta diskusi berkala dengan pembimbing penelitian untuk mengidentifikasi potensi bias dan asumsi yang dapat mempengaruhi interpretasi data.